

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2024 NOMOR 34

---

## **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 16 OKTOBER 2024

NOMOR : 34 TAHUN 2024

TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI  
TAHUN 2025

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

Bagian Hukum  
2024



**SALINAN**

WALI KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 1);
19. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 16);
20. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2025.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat DPRD;
  - c. Inspektorat Daerah;
  - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - e. Dinas Kesehatan;
  - f. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
  - g. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
  - h. Dinas Lingkungan Hidup;
  - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
  - j. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan;
  - k. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
  - l. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
  - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - o. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - p. Dinas Perhubungan;
  - q. Dinas Sosial;
  - r. Dinas Tenaga Kerja;
  - s. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
  - t. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - u. Badan ...

- u. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
  - v. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - w. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - x. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - y. Kecamatan Cikole;
  - z. Kecamatan Warudoyong;
  - aa. Kecamatan Lembursitu;
  - bb. Kecamatan Gunung Puyuh;
  - cc. Kecamatan Citamiang;
  - dd. Kecamatan Baros; dan
  - ee. Kecamatan Cibeureum.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Tahun 2024-2026.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2025.

#### Pasal 3

Dalam hal Renja Tahun 2025 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berbeda dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi, Perangkat Daerah menggunakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi.

#### Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 16 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

KUSMANA HARTADJI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 16 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

MOHAMMAD HASAN ASARI

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2024 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,



YUDI PEBRIANSYAH  
NIP. 19830207 200604 1 010

M. RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUKABUMI TAHUN 2025

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan dinas. Sebagai suatu dokumen resmi rencana kerja mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka RKP 2019 memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, dan lintas wilayah serta kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan menyusun Rencana Kerja yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota serta mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJMN. Berpedoman pada RPJMD dimaksudkan untuk menjamin keselarasan prioritas dan sasaran pembangunan serta program/kegiatan tahunan dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sedangkan mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJMN dimaksudkan untuk menjamin keselarasan program/kegiatan pembangunan daerah kabupaten/Kota dengan program/kegiatan pembangunan daerah provinsi dan prioritas pembangunan nasional.

Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan dinas. Sebagai suatu dokumen resmi rencana kerja perangkat daerah mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dokumen Renja perangkat daerah secara umum mempunyai nilai sangat strategis dan penting, antara lain:

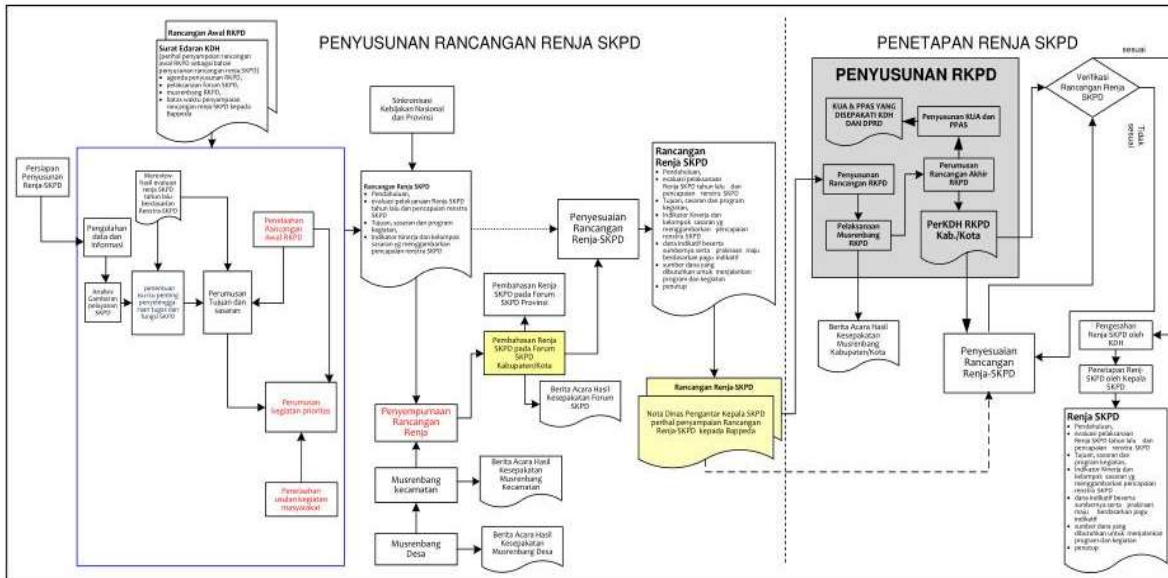
1. merupakan instrument pelaksanaan RPJMD;
2. menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja perangkat daerah, berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD;
3. mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;
4. menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD;
5. menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan Rencana Kerja Dinas.

Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rencana Kerja;
2. Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja;
3. Penyusunan rancangan Rencana Kerja;
4. Pelaksanaan musrenbang Rencana Kerja;
5. Perumusan rancangan akhir Rencana Kerja;
6. Penetapan Rencana Kerja.

Bagan alur penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut:

Alur Penyusunan Rencana Kerja  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi



## 1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7);

20. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi 2011-2031 (Lembar Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi);
22. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 19);
23. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 148 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 68);
24. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2025.

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi Tahun 2025 disusun sebagai acuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

#### 1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan umum Anggaran (KUA), prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah yang mencakup latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah.

### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD. Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T.C-29.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah serta dengan Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

Lampiran Tabel T-C.31

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan

pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel T-C.32.

### BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah  
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
- 3.3. Program dan Kegiatan  
Berisikan penjelasan mengenai:
  - a. faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
    - 1) Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah;
    - 2) Pencapaian SDGs;
  - b. uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
    - 1) jumlah program dan jumlah kegiatan;
    - 2) total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

- c. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan tabel T-C. 33

#### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut;

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama perangkat Daerah dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah ditunjukkan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Perangkat Daerah ini terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan wajib yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian kinerja Rencana Strategis ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana kerja tahun lalu, dan realisasi Rencana Strategis Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD.

Adapun yang menjadi Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi yang dilaksanakan, yaitu:

##### 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan;

Mempunyai Indikator Tujuan Yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, cara penghitungannya yaitu berdasarkan hasil penilaian Masyarakat pada aplikasi Like's (layanan Survei Kepuasan Masyarakat).

memiliki 2 sasaran yaitu:

- 1.1 Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan
  - 1.1.1 Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan
    - 1.1.1.1 Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan, didukung oleh Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, memiliki cara penghitungan jumlah penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil di bagi jumlah penduduk yang mengajukan layanan di kali 100%;
    - 1.1.1.2 Cakupan Profil Perkembangan Kependudukan, didukung oleh Program Pengelolaan Profil Kependudukan, memiliki cara penghitungan yaitu jumlah buku profil kependudukan dibagi target profil dikali 100%;
    - 1.1.1.3 Cakupan Dokumen Administrasi Kependudukan didukung oleh program Pendaftaran Penduduk, memiliki uraian sebagai berikut;
      - 1.1.1.3.1 Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga, memiliki cara penghitungan yaitu jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan dibagi jumlah yang seharusnya memiliki Kartu Keluarga di kali 100%;
      - 1.1.1.3.2 Cakupan Perekaman KTP-el, memiliki cara penghitungan yaitu jumlah wajib KTP yang direkam dibagi jumlah wajib KTP di kali 100%;
      - 1.1.1.3.3 Cakupan Kepemilikan KTP-el, memiliki cara penghitungan yaitu jumlah yang memiliki KTP-el dibagi jumlah wajib KTP di kali 100%;
      - 1.1.1.3.4 Cakupan Kepemilikan KIA, memiliki cara penghitungan yaitu jumlah yang memiliki KIA dibagi jumlah usia <17 tahun;
      - 1.1.1.3.5 Cakupan Laporan Penduduk Non Permanen, memiliki cara penghitungan yaitu jumlah laporan dibagi jumlah target laporan dikali 100%

- 1.1.1.4 Cakupan Dokumen Pencatatan Sipil didukung oleh program Pencatatan Sipil, memiliki uraian sebagai berikut;
  - 1.1.1.4.1 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 Tahun, memiliki cara penghitungan yaitu jumlah akta yang terbit dibagi jumlah anak dikali 100%;
  - 1.1.1.4.2 Cakupan Kepemilikan Akta Kematian, memiliki cara penghitungan yaitu jumlah akta yang terbit dibagi jumlah yang lapor dikali 100%;
  - 1.1.1.4.3 Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan, memiliki cara penghitungan yaitu jumlah akta perkawinan yang terbit dibagi jumlah yang lapor dikali 100%;
  - 1.1.1.4.4 Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian, memiliki cara penghitungan yaitu jumlah akta perceraian yang terbit dibagi jumlah yang lapor dikali 100%

## 2.1 Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah

### 2.1.1 Predikat SAKIP Dinas

#### 2.1.1.1 Nilai SAKIP Dinas

#### 2.1.1.2 Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu

Program dan Kegiatan yang ada pada Tahun 2024 adalah Sebagai Berikut:

## I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
  - b. Koordinasi dan Penyusunan perubahan dokumen RKA-SKPD;
  - c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
  - d. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
  - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
  - d. Penyusunan Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran.
  
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  - b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
  
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
  
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor;
  - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
  - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
  
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Pengadaan Mebel;
  - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
  
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
  
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- a. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan;
- b. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

III. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

1. Pelayanan Pencatatan Sipil

- a. Pencatatan Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting
- b. Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

IV. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

- a. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- a. Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

V. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

1. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain.

MATEK PENGENDALIAN TAHUN ANGGARAN 2024																		
DISDUKAPIL																		
Kode	Tujuan/Sasaran	Uraian/Bidang Uraian Penetapan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Realisasi Tahunan I				Realisasi s.d. Triwulan I				Sumber Pendanaan	Permasalahan	Alternatif Solusi		
			Indikator	Satuan	Target	Anggaran 2024 (Rp)	Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	%	Kinerja	Capaian (%)	Anggaran (Rp)				%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2.12.01	Tujuan : Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URURAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ADYA	Persentase Ketercapaian Laporan kinerja dan keuangan tingkat satuan	%	100	6.942.873.973	42,33	42,33	1.963.300.411	52,82	73,03	73,03	1.963.300.411	52,82	APBD			
2.12.01.2.01		Pencapaian Penganggaran dan etabilitas kinerja perangkat Daerah	persentase ketercapaian dokumen perencanaan evaluasi kinerja dan laporan kinerja perangkat daerah	%	100	30.221.100	0,00	0,00	13.635.100	43,00	53,18	53,18	13.635.100	43,00	APBD			
2.12.01.2.01.01		Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	16.490.100	0	0,00	13.635.100	82,81	3	100,00	13.635.100	82,81	APBD			
2.12.01.2.01.03		Koordinasi dan penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	821.800	0	0,00	0	0,00	2	66,67	-	0,00	APBD			
2.12.01.2.01.04		Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	3	499.800	0	0,00	0,00	0,00	2	66,67	-	0,00	APBD			
2.12.01.2.01.05		Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	3	499.800	0	0,00	0,00	0,00	2	66,67	-	0,00	APBD			
2.12.01.2.01.06		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ditinjau realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ditinjau Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ditinjau Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	22	3.962.050	0	0,00	0	0,00	2	9,09	-	0,00	APBD			
2.12.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	6.000.500	0	0,00	0,00	0,00	1	10,00	0,00	0,00	APBD			
2.12.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen administratif keuangan perangkat daerah	%	100	3.526.723.096	25,00	25,00	896.165.278	25,41	60,00	25,00	896.165.278	25,41	APBD			
2.12.01.2.02.01		Penyediaan Gap dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gap dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	22	3.524.954.096	22	100,00	896.165.278	25,43	22	100,00	896.165.278	25,43	APBD			
2.12.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	5	679.000	-	0,00	0,00	0,00	1	20,00	0,00	0,00	APBD			
2.12.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	5	526.750	-	0,00	0,00	0,00	1	20,00	0,00	0,00	APBD			
2.12.01.2.02.08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosa Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosa Realisasi Anggaran	Dokumen	1	562.450	-	0,00	0,00	0,00	1	100,00	0,00	0,00	APBD			
2.12.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Barang Milik Daerah	%	100	1.999.900	0,00	0,00	-	0,00	100,00	100,00	0	0,00	APBD			

2.12.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	999.950	-	0,00										
2.12.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	999.950	-	0,00										
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan administrasi kepegawaian sesuai standar	%	100	34.999.850	0,00	0,00	-	0,00	100,00	100,00	0	0,00	APBD			
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	53	34.999.850	-	0,00		0,00	53	100,00		0,00	APBD			
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen administrasi umum perangkat daerah	%	100	902.081.500	54,33	54,33	575.354.107	63,79	71,02	71,02	575.354.107	63,79	APBD			
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	32.642.400	1	100,00	2.642.400	8,09	1	100,00	2.642.400	8,09	APBD			
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1	399.999.750	1	100,00	358.853.650	89,71	1	100,00	358.853.650	89,71	APBD			
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	4	59.998.350	-	0,00	11.556.100	19,26	4	100,00	11.556.100	19,26	APBD			
2.12.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan pengandaian	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang disediakan	Paket	4	169.998.000	24	100,00	138.621.200	81,54	24	100,00	138.621.200	81,54	APBD			
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	1.480.000		0,00	400.000	27,03		0,00	400.000	27,03	APBD			
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	402	237.963.000	105	26,12	63.280.757	26,59	105	26,12	63.280.757	26,59	APBD			
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan	%	100	123.448.517	100,00	100,00	30.450.000	24,66	100,00	100,00	30.450.000	24,66	APBD			
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	paket	1	96.640.000	1	100,00	30.450.000	30,87	1	100,00	30.450.000	30,87	APBD			
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	unit	3	24.828.837	3	100,00	8.573.500	34,53	3	100,00		0,00	APBD			

2.12.01.2.08		Penyediaan jasa Penunjang Utasan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan	%	100	1.078.376.790	100,00	100,00	298.731.248	27,70	100,00	100,00	298.731.248	27,70	APBD		
2.12.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Perencanaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	800.000	1	100,00	800.000	100,00	1	100,00	800.000	100,00	APBD		
2.12.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	1	285.133.460	1	100,00	68.597.038	24,06	1	100,00	68.597.038	24,06	APBD		
2.12.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	1	792.443.300	1	100,00	229.334.208	28,94	1	100,00	229.334.208	28,94	APBD		
2.12.01.2.09		Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Penunjang Utasan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan bangun milik daerah sesuai kebutuhan	%	100	344.741.930	55,50	55,50	168.944.890	49,01	100,00	100,00	168.944.890	49,01	APBD		
2.12.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Bawa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	17	200.000.000	17	17,00	41.201.500	20,60	17	100,00	41.201.500	20,60	APBD		
2.12.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	25	24.891.930	25		8.573.500	34,44			8.573.500	34,44	APBD		
2.12.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	unit	1	119.850.000	1	100,00	119.169.880	99,43	1	100,00	119.169.880	99,43	APBD		
2.12.02	Tujuan : Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Sasaran : Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	II PROGRAM PENDAFTARAN PENDUKUK	Cakupan dokumen Administrasi kependudukan	%	100	300.665.000	20,00	20,00	113.120.000	37,62	4,00	4,00	113.120.000	37,62	APBD		
2.12.02.2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan KK, Cakupan Kepemilikan KTP, Cakupan Perekaman KTP, Cakupan Kepemilikan KIA, dan Cakupan Laporan Penduduk Non Permanen	%	100	300.665.000	20,00	20,00	113.120.000	37,62	4,00	4,00	113.120.000	37,62	APBD		
2.12.02.2.01.01		Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rerutan Administrasi kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rerutan Administrasi Kependudukan	Dokumen	2	7.663.650	-	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	APBD		
2.12.02.2.01.04		Peringatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peringatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	20	293.001.950	8	40,00	113.120.000	38,61	1	5,00	113.120.000	38,61	APBD		

2.12.03		<b>III PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	Cakupan Dokumen Pendaftaran Sipil	%	100	72.245.500	100,00	100,00	40.975.000	56,70	100,00	100,00	40.975.000	56,70	APBD		
2.12.03.2.01		<b>PELAYANAN PENCATATAN SIPIL</b>	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun, Cakupan Kepemilikan Akta Kematian, Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan, Cakupan Kepemilikan Akta Perenzahan,	%	100	72.245.500	100,00	100,00	40.975.000	56,70	100,00	100,00	40.975.000	56,70	APBD		
2.12.03.2.01.01		Pencatatan Penatausahaan dan persebitan dokumen atas pelaporan Peristiwa penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Persebitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	9000	41.765.000	9,000	100,00	37.920.000	90,79	9,000	100,00	37.920.000	90,79	APBD		
2.12.03.2.01.02		Pengujian Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil Yang Ditingkatkan	Layanan	1	30.499.700	1	100,00	3.055.000	10,02	1	100,00	3.055.000	10,02	APBD		
2.12.04		<b>IV PROGRAM PENGELOAAN INFORMASI ADMINISTRASI</b>	Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	100	128.722.000	100,00	100,00	21.259.000	16,73	100,00	100,00	21.259.000	16,73	APBD		
2.12.04.2.01		Pengumpulan data Kependudukan dan pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Cakupan Data Kependudukan dan Pencatatan Data	%	100	18.575.000	100,00	100,00	1.170.000	5,98	100,00	100,00	1.170.000	5,98	APBD		
2.12.04.2.01.01		Pengujian dan penyajian data kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Diujikan	Dokumen	100	19.575.000	100	100,00	1.170.000	5,98	100	100,00	1.170.000	5,98	APBD		
2.12.04.2.03		Penyenggaraan Pengelolan Informasi Administrasi	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Lembaga Pengguna	%	100	107.147.000	100,00	100,00	20.089.000	18,75	100,00	100,00	20.089.000	18,75	APBD		
2.12.04.2.05		Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	107.147.000	1,00	100,00	20.089.000	18,75	3,00	100,00	20.089.000	18,75	APBD		
2.12.05		<b>V PROGRAM PENGELOAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	Cakupan Profil Perencanaan Kependudukan	%	100	8.850.000	0,00	0,00	650.000	7,34	0,00	0,00	650.000	7,34	APBD		
2.12.05.2.01		<b>PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	Pemertasa Ketertarikan Data Kependudukan	%	100	8.850.000	0,00	0,00	650.000	7,34	0,00	0,00	650.000	7,34	APBD		
2.12.05.2.01.02		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Persekitar Kependudukan serta kebutuhan lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Persekitar Kependudukan serta kebutuhan lain	Dokumen	25	8.850.000	0,00	0,00	650.000	7,34	0,00	0,00	650.000	7,34	APBD		
<b>Jumlah</b>						<b>6.551.177.073</b>	<b>52,45</b>	<b>52,45</b>	<b>2.159.304.611</b>	<b>32,96</b>	<b>55,41</b>	<b>55,41</b>	<b>2.159.304.611</b>	<b>32,96</b>	<b>APBD</b>		

Capaian Kinerja Program RPD Triwulan I Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tujuan ke satu Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan, mempunyai indikator tujuan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat.

Sasaran strategis yang pertama adalah Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut:

1. Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan
  - 1.1 Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan target 100% pencapaian sebesar 100%;
  - 1.2 Cakupan Profil Perkembangan Kependudukan target 100% Pencapaian sebesar 100%;
  - 1.3 Cakupan Dokumen Administrasi Kependudukan, terdiri dari:
    - 1.3.1 Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga sebesar 99,62%;
    - 1.3.2 Cakupan Perekaman KTP-el sebesar 98,65%;
    - 1.3.3 Cakupan Kepemilikan KTP-el sebesar 98,65%;
    - 1.3.4 Cakupan Kepemilikan KIA sebesar 66,68%;
    - 1.3.5 Cakupan Laporan Penduduk Non Permanen 0%.
  - 1.4 Cakupan Dokumen Pencatatan Sipil
    - 1.4.1 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 Tahun sebesar 99,38%;
    - 1.4.2 Cakupan Kepemilikan Akta Kematian sebesar 100%;
    - 1.4.3 Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan sebesar 70,96%;
    - 1.4.4 Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian sebesar 100%.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
  - 2.1 Predikat SAKIP Dinas
    - 2.1.1 NILAI SAKIP Dinas angka 77,31
    - 2.1.2 Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu sebesar 100 %

Program dan Kegiatan yang ada pada Tahun 2024 adalah Sebagai Berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 16.490.100,- dengan realisasi Rp. 13.655.100,- tercapai 82,81%;
  - b. Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 821.800,- dengan realisasi Rp. 0,- tercapai 0 %;
  - c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 499.800,- dengan realisasi Rp. 0,- tercapai 0%;
  - d. Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 499.800,- dengan realisasi Rp. 0,- tercapai 0%;
  - e. Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebesar Rp. 5.962.050,- dengan realisasi Rp. 0,- tercapai 0%;
  - f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 6.008.550,- dengan realisasi Rp. 0,- tercapai 0%;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 3.599.204.806,- dengan realisasi Rp. 896.165.278,- tercapai 24%;
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 679.000,- Realisasi 0, tercapai 0%;
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan anggaran Rp. 526.750,- Realisasi Rp.0 tercapai 0%;
  - d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan anggaran Rp. 562.450,- Realisasi Rp. 0 tercapai 0%.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- a. Penyusun Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 999.950,- Realisasi Rp. 0, tercapai 0%;
  - b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 999.950,- Realisasi Rp. 0,- tercapai 0%.
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan, dengan anggaran Rp. 35.999.850,- Realisasi Rp. 0,- tercapai 0%
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran Rp. 32.642.400,- Realisasi Rp. 2.642.400,- tercapai 8,09%;
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran Rp. 399.999.750,- Realisasi Rp.358.853.650,- tercapai 89,71%;
  - c. Penyediaan bahan logistik kantor, dengan anggaran Rp. 59.998.350,- Realisasi Rp. 11.556.100,- tercapai 19,26%;
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran Rp. 169.998.000,- Realisasi Rp. 138.621.200,- tercapai 81,54%;
  - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran Rp. 1.480.000,- Realisasi Rp. 400.000,- tercapai 1.080.000,-%;
  - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran Rp. 237.963.000,- Realisasi Rp. 63.280.757,- tercapai 26,59%.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Pengadaan Mebel, dengan anggaran Rp. 98.640.000,- Realisasi Rp. 30.450.000,- tercapai 30,87%;
  - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Dengan anggaran Rp. 24.828.837,- Realisasi Rp. 0 tercapai 0%.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran Rp. 800.000,- Realisasi Rp. 800.000,- tercapai 100%;
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran Rp. 285.133.460,- dengan Realisasi Rp. 68.597.038,- tercapai 24,06 %;
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran Rp. 792.443.300,- dengan realisasi Rp. 229.334.208,- tercapai 28,94%,-
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran Rp. 200.000.000,- dengan realisasi Rp. 41.201.500,- tercapai 20,60%;
  - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran Rp. 24.828.837,- dengan realisasi Rp. 8.573.500,- tercapai 34,44 %;

- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya, dengan anggaran Rp. 119.850.000,- dengan realisasi Rp. 119.169.880,- tercapai 99,43%.

I. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- a. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan administrasi kependudukan, dengan anggaran Rp. 7.663.650,- dengan realisasi Rp. 0,- tercapai 0 %;
- b. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dengan anggaran Rp. 293.001.950,-, dengan realisasi Rp. 113.120.000,- tercapai 38,61%.

II. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Pelayanan Pencatatan Sipil

- a. Pencatatan Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting, dengan anggaran Rp. 41.765.800,- realisasi Rp. 37.920.000,- tercapai 90,79 %
- b. Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil, dengan anggaran Rp. 30.499.700,-, realisasi Rp. 3.055.000,- tercapai 10,02 %

IV. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1. Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan  
Pengolahan dan Penyajian data kependudukan, dengan anggaran Rp. 19.575.000,- realisasi Rp. 1.179.000,- tercapai 5,98%
2. Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan  
Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dengan anggaran Rp. 107.147.000,- realisasi Rp. 20.089.000,- tercapai 18,75%

VI. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN

Penyusunan Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain, dengan anggaran Rp. 8.850.000,- realisasi Rp. 650.000,- tercapai 7,34%.

Tabel T-C.29.  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra  
Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)\*  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan dan Subkegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program, kegiatan dan subkegiatan (Renja Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (n-1) s.d triwulan I	
					Target Renja Tahun 2022 (N-2)	Realisasi Renja Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) s.d triwulan I	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) triwulan I
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				6.369.182.405	8.046.276.788	8.011.085.541	99,56	6.625.426.993	2.194.365.811	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA</b>	Persentase Ketersediaan Laporan kinerja dan keuangan tepat waktu		6.063.397.705	7.556.618.038	7.521.636.291	99,54	6.116.923.893	2.018.361.811	33,00
	Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan evaluasi kinerja dan laporan kinerja perangkat daerah.		34.961.700	16.282.550	16.282.550	100	30.282.100	13.655.100	45,09
2.12.2.12.0.001.2.01.01	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		17.490.400	7.490.150	7.490.150	100,00	16.490.100	13.655.100	82,81
2.12.2.12.0.001.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD		500.000	821.800	821.800	100,00	821.800		-
2.12.2.12.0.001.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD		500.000	499.800	499.800	100,00	499.800		-
2.12.2.12.0.001.2.01.05	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD		500.000	499.800	499.800	100,00	499.800		-
2.12.2.12.0.001.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		14.962.200	5.962.150	5.962.150	100	5.962.050		-
2.12.2.12.0.001.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		1.009.100	1.008.850	1.008.850	100	6.008.550		-

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penyusunan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100	3.365.731.155	3.103.548.807	3.091.864.988	100	3.600.973.006	896.165.278	24,89
2.12.2.12.0.001.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		3.363.962.555	3.101.780.607	3.090.097.528	100	3.599.204.806	896.165.278	24,90
2.12.2.12.0.001.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		679.100	679.000	679.000	100	679.000	-	
2.12.2.12.0.001.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah buku laporan keuangan bulanan. Triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD		527.000	526.750	526.050	100	526.750	-	
2.12.2.12.0.001.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran		562.500	562.450	562.410	100	562.450	-	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Barang Milik Daerah Perangkat Daerah						1.999.910	-	-
2.12.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan barang Milik Daerah SKPD						999.950		
2.12.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						999.960		
2.12.2.12.0.001.2.05.10	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi kepegawaian sesuai standar		35.145.000	35.144.700	35.061.200	99,76	34.999.850	35.061.200	100,18
2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan perundang-undangan	100	35.145.000	35.144.700	35.061.200	99,76	34.999.850	35.061.200	100,18
2.12.2.12.0.001.2.06.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah		1.299.571.150	1.123.450.970	1.116.765.870	100	902.081.500	575.354.107	63,78
2.12.2.12.0.001.2.06.02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan		2.558.600	6.858.500	6.858.500	100	32.642.400	2.642.400	8,09
2.12.2.12.0.001.2.06.04	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		905.778.550	704.204.880	698.169.110	99,14	399.999.750	358.853.650	89,71
2.12.2.12.0.001.2.06.05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik		56.768.000	64.965.440	64.962.675	100,00	59.998.350	11.556.100	19,26
2.12.2.12.0.001.2.06.06	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan		196.791.000	153.787.150	153.698.150	99,94	169.998.000	138.621.200	81,54
2.12.2.12.0.001.2.06.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah bahan bacaan		1.480.000	1.480.000	1.480.000	100	1.480.000	400.000	27,03
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	100	136.195.000	192.155.000	191.597.435	100	237.963.000	63.280.757	26,59

2.12.2.12.0.001.2.07.05+B35:149	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur		86.500.000	1.773.055.000	1.772.241.233	100,00	123.468.837	30.450.000	24,66
2.12.2.12.0.001.2.07.06	Pengadaan Mebel	jumlah mebel		8.000.000	8.000.000	8.000.000	100,00	98.640.000	30.450.000	30,87
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin	100	78.500.000	1.765.055.000	1.764.241.233	100	24.828.837		-
2.12.2.12.0.001.2.08.01	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		1.082.458.200	1.088.295.060	1.074.311.189	98,72	1.078.376.760	298.731.246	27,70
2.12.2.12.0.001.2.08.02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai		750.000	1.344.000	1.340.000	99,70	800.000	800.000	100,00
2.12.2.12.0.001.2.08.04	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran rekening listrik, air, telepon, danfaksimili/ Internet		283.998.000	285.133.460	284.618.480	99,82	285.133.460	68.597.038	24,06
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga keamananan, jumlah tenaga kebersihan, , jumlah THL	100	797.710.200	801.817.600	788.352.709	98,32	792.443.300	229.334.208	28,94
2.12.2.12.0.001.2.09.06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase terpeliharanya barang milik daerah		159.030.500	416.840.951	415.109.261	100	344.741.930	168.944.880	49,01
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya						200.000.000	41.201.500	20,60
2.12.2.12.0.001.2.09.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan kendaraan dinas, jumlah perbaikan peralatan kantor		144.030.500	171.850.951	171.173.724	99,61	24.891.930	8.573.500	34,44
	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah terpeliharanya gedung kantor	100	15.000.000	244.990.000	243.935.537	99,57	119.850.000	119.169.880	99,43
	<b>II PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	cakupan kepemilikan KK, cakupan kepemilikan KTP-el, cakupan kepemilikan KIA	100	221.668.500	405.543.150	405.371.150	100	300.665.600	113.120.000	37,62
2.12.2.12.0.002.2.01.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Prosentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan		221.668.500	405.543.150	405.371.150	100	300.665.600	113.120.000	37,62
2.12.2.12.0.002.2.01.04	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi kependudukan	jumlah laporan pendataan penduduk non permanen dan penerbitan dokumen		8.156.200	8.155.900	8.155.900	100	7.663.650	-	-
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk	100	213.512.300	397.387.250	397.215.250	100	293.001.950	113.120.000	38,61

	<b>III PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	Cakupan Kepemilikan akte kelahiran, cakupan kepemilikan akte kematian, cakupan kepemilikan akte perkawinan	100	44.491.200	44.490.600	44.490.600	100	72.265.500	40.975.000	56,70
2.12.2.12.0.003.2.01.01	PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	Prosentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan		44.491.200	44.490.600	44.490.600	100	72.265.500	40.975.000	56,70
2.12.2.12.0.003.2.01.02	Pencatatan Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan Peristiwa penting	jumlah pelayanan akta akta pencatatan sipil		23.931.200	27.290.900	27.290.900	100	41.765.800	37.920.000	90,79
	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penetapan isbatu nikah dari Pengadilan Agama		20.560.000	17.199.700	17.199.700	100	30.499.700	3.055.000	10,02
	<b>IV PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI</b>	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	100	30.250.000	30.250.000	30.212.500	100	126.722.000	21.259.000	16,78
2.12.2.12.0.004.2.01.01	Pengumpulan data Kependudukan dan pemanfaatan	Cakupan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data	100	8.215.000	8.215.000	8.177.500	100	19.575.000	1.170.000	5,98
	Pengolahan dan penyajian data kependudukan	jumlah buku data agregat kependudukan	100	8.215.000	8.215.000	8.177.500	100	19.575.000	1.170.000	5,98
2.12.2.12.0.004.2.03.05	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi	Terlaksananya Sosialisasi Administrasi Kependudukan	100	22.035.000	22.035.000	22.035.000	100	107.147.000	20.089.000	18,75
	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	jumlah media sosialisasi	100	22.035.000	22.035.000	22.035.000	100	107.147.000	20.089.000	18,75
	<b>V PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	100	9.375.000	9.375.000	9.375.000	100	8.850.000	650.000	7,34
2.12.2.12.0.005.2.01.02	PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Ketersediaan Data Kependudukan	100	9.375.000	9.375.000	9.375.000	100	8.850.000	650.000	7,34
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	100	9.375.000	9.375.000	9.375.000	100	8.850.000	650.000	7,34

Untuk TC. 29 kami menyajikan Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2024 (tahun berjalan), pada tabel ini disajikan Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2026, Target Program/kegiatan RKPD tahun berjalan, Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan tahun lalu n-2, Target program dan kegiatan Renja n-1, dan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan tahun berjalan (triwulan 1).

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel T-C.30  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
kota Sukabumi

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK outcome	IKK output	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024 per maret	Tahun 2025	Tahun 2026	
					(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat				81	82	83	91,43	93,48	91,43	91,43	
2	Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan				100	100	100	100	100	100	100	
3	Cakupan Profil Perkembangan Kependudukan				100	100	100	100	100	100	100	
4	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga				100	100	100	99,86	99,86	100	100	
5	Cakupan Perekaman KTP-el		Perekaman KTP Elektronik		99,6	99,7	99,8		98,51	99,7	99,8	
6	Cakupan Kepemilikan KTP-el				100	100	100	99,44	98,65	100	100	
7	Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)		persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA		60	70	80	61,25	65,39	60	70	
8	Cakupan Laporan Penduduk Non Permanen				100	100	100		-	100	100	
9	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun		Kepemilikan Akte Kelahiran		100	100	100		98,20	100	100	
10	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian			Penerbitan Akta kematian	100	100	100		100	100	100	
11	Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan			Penerbitan Akta Perkawinan	100	100	100		70,17	100	100	
12	Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian			Penerbitan Akta Perceraian	100	100	100		100	100	100	

Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi dengan Indikator sebagai Berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat;
2. Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan;
3. Cakupan Profil Perkembangan Kependudukan;
4. Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga;
5. Cakupan Perekaman KTP-el
6. Cakupan Kepemilikan KTP-el;
7. Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA);
8. Cakupan Laporan Penduduk Non Permanen;
9. Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran usia 0-18 Tahun;
10. Cakupan Kepemilikan Akta Kematian;
11. Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan;
12. Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian.

IKK untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi adalah sebagai berikut :

#### IKK OUTCOME

1. Perekaman KTP Elektronik;
2. Prosentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA;
3. Kepemilikan Akta Kelahiran;
4. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama.

#### IKK OUTPUT

- a. Penerbitan Akta Perkawinan;
- b. Penerbitan Akta Perceraian;
- c. Penerbitan Akta Kematian;
- d. Penyajian Data Kependudukan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah  
Isu Strategis Dukcapil yang tertuang dalam Renstra adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis NIK

Bahwa reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu ukurannya adalah pelayanan publik harus memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Setiap unit pelayanan publik harus dapat memvalidasi masyarakat yang dilayaninya tersebut tercatat sah secara administrasi kependudukan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan haknya. Selain dari pada itu, validasi data kependudukan dimaksudkan juga untuk menghindari adanya perbuatan melanggar hukum dari masyarakat yang mengajukan pelayanan publik.

Pemanfaatan data kependudukan untuk proses validasi dilakukan dengan cara memadankan data kependudukan yang tersimpan dalam database Dukcapil Kemendagri dengan dokumen kependudukan yang dibawa oleh pemohon ke tempat pelayanan publik. Peadanan data ini berbasiskan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dalam Renja Tahun 2024 akan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan;
2. Pemenuhan perjanjian Kerjasama.

2. Digitalisasi Administrasi Kependudukan

Saat ini pelayanan administrasi kependudukan dan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil telah bertransformasi dari bentuk manual menjadi bentuk digital. Dokumen kependudukan dan pencatatan sipil telah berubah dengan diterapkannya tanda tangan elektronik berupa QRCode untuk setiap cetakan dalam bentuk kertas. Selain dalam bentuk cetakan, dokumen-dokumen tersebut juga dapat dimiliki oleh penduduk berupa file digital.

Kemudian untuk mengintegrasikan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara digital, Dukcapil Kemendagri sedang mengembangkan *super apps* dengan nama Identitas Kependudukan Digital (IKD). Setiap penduduk yang telah melakukan aktivasi IKD akan dapat memiliki dokumen kependudukan

dan pencatatan sipil dalam bentuk digital. Yang mana nanti penduduk tersebut dapat menggunakan dokumen-dokumen tersebut di tempat pelayanan publik melalui mekanisme otentikasi yang telah ditentukan. Namun demikian, tantangan selanjutnya adalah bagaimana memberikan pemahaman dan pelayanan kepada masyarakat yang multi kultural dari berbagai segmen untuk mendapatkan manfaat dari program digitalisasi administrasi kependudukan ini sehingga seluruh penduduk merasa lebih mudah, lebih cepat dan lebih aman dalam memiliki dan menggunakan dokumen kependudukan yang dimilikinya. Dalam Renja Tahun 2024 akan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: Percepatan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk kota sukabumi (Jempol IKD)

### 3. Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

Inovasi pelayanan di bidang administrasi kependudukan adalah mutlak dilaksanakan secara terus menerus. Hal ini bertujuan agar pelayanan administrasi kependudukan dirasakan semakin cepat dan mudah oleh penduduk yang memerlukan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Pelayanan administrasi kependudukan diharapkan dapat dilaksanakan sampai ke pintu rumah setiap penduduk sehingga penduduk tidak perlu lagi datang ke kantor Disdukcapil ataupun titik-titik pelayanan reguler lainnya.

Namun demikian, pelayanan yang cepat dan mudah tetap harus memenuhi pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi prinsip kehati-hatian.

Dalam Renja Tahun 2024 akan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Merpercepat penerbitan akte kematian melalui buku pokok pemakaman;
2. Layanan Mantel Semar (Layanan Perekaman KTP-el Pemula di Sekolah dan Madrasah), yaitu kegiatan jemput bola pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (Perekaman KTP-el dan Pencetakan KTP-el) yang dilaksanakan di sekolah-sekolah menengah tingkat atas untuk menjaring penduduk yang baru mencapai usia 17 tahun sebagai batas usia awal terutama dalam meningkatkan cakupan kepemilikan KTP Elektronik (KTP-el).

#### 4. Dukungan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024

Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 merupakan ajang pesta demokrasi terbesar di Indonesia karena akan diselenggarakan secara serentak. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahwa penduduk yang memiliki hak pilih adalah penduduk yang tercatat sebagai Warga Negara Indonesia di sistem Dukcapil.

Beberapa hal yang menjadi target Disdukcapil untuk mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 adalah :

- a. Pemenuhan kepemilikan KTP-el bagi seluruh Warga Negara Indonesia yang berusia 17 tahun pada saat pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024;
- b. Penerbitan akta kematian bagi seluruh penduduk yang meninggal agar pada saat pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 penduduk yang meninggal tersebut tidak lagi tercantum sebagai pemilih.
- c. Pemenuhan pelayanan administrasi kependudukan untuk perubahan-perubahan data bagi penduduk Warga Negara Indonesia.
- d. Dalam Renja Tahun 2024 akan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: Jemput Bola Pelayanan (JEMPOL)

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan kinerja tahun serta Solusi yang telah dilakukan

INTERNAL	EKSTERNAL
<i>STRENGTH</i> (KEKUATAN)	<i>OPPORTUNITIES</i> (PELUANG)
1. Kewenangan pengelolaan administrasi kependudukan pada tingkat Kota Sukabumi ada pada Disdukcapil Kota Sukabumi. 2. Dasar hukum pengelolaan Administrasi Kependudukan cukup	1. Dokumen kependudukan merupakan dasar pelayanan untuk pelayanan public lainnya. 2. Adanya dukungan yang sangat baik dari Lintas Sektor Pemerintahan Kota Sukabumi dalam pelayanan

<p>jelas tertuang dalam peraturan perundang-undangan .</p> <p>3. Komitmen pegawai Disdukcapil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat bagus.</p> <p>4. Posisi kantor Disdukcapil sangat strategis berada dekat dengan Pusat Pemerintahan dan sangat mudah dijangkau oleh warga kota Sukabumi.</p>	<p>kependudukan kepada masyarakat.</p> <p>3. Pelayanan Administrasi Kependudukan yang diarahkan menuju Go Digital dari Dirjen Dukcapil</p> <p>4. Luas Wilayah Kota Sukabumi yang relative sedang dan jumlah penduduk Kota Sukabumi yang masuk kategori Kota dengan penduduk kurang dari 500.000 jiwa.</p>
INTERNAL	EKSTERNAL
WEAKNESSES (KELEMAHAN)	TREATH (TANTANGAN)
<p>1. Sarana dan prasarana Disdukcapil belum memadai</p> <p>2. Anggaran yang sangat terbatas</p> <p>3. Kompetensi SDM belum memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>4. Implementasi Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan yang belum optimal</p>	<p>1. Perubahan peraturan yang sangat cepat terkait Administrasi Kependudukan</p> <p>2. Jaringan internet yang tidak stabil</p> <p>3. Aliran listrik yang terkadang mati dari PLN .</p> <p>4. Kesadaran Masyarakat masih rendah dalam pengurusan Adminduk</p>

DSA	STRENGTH (KEKUATAN)	WEAKNESSES (KELEMAHAN)
<p><b>OPPORTUNITIES (PELUANG)</b></p>	<p><i>SO : Use/Build S to take Advantage O</i></p> <p>1. Memperkuat peran Disdukcapil melalui kolaborasi dengan institusi pelayanan public lain</p> <p>2. Memperkuat respon dukungan dari Lintas Sektor dalam pelayanan Administrasi Kependudukan dengan memberikan kejelasan aturan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pelayanan Administrasi Kependudukan.</p> <p>3. Pengembangan layanan Administrasi Kependudukan Go</p>	<p><i>WO : Take Advantage of O by Overcoming W</i></p> <p>1. Memanfaatkan sarana yang ada untuk pelayanan jemput bola pada instansi layanan public lain.</p> <p>2. Mengoptimalkan dukungan Lintas Sektor dalam memberikan layanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat dengan menggunakan alokasi anggaran seefisien mungkin .</p> <p>3. Mengembangkan layanan Administrasi Kependudukan Go Digital untuk memberikan</p>

	<p>Digital melalui penguatan komitmen pegawai untuk melayani masyarakat lebih baik lagi</p> <p>4. Meningkatkan pelayanan jemput bola Administrasi Kependudukan di tengah tengah masyarakat melalui layanan keliling Jempol selain pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>	<p>pelayanan yang optimal kepada warga masyarakat melalui aplikasi Administrasi Kependudukan Mochi Legit.</p> <p>4. Melaksanakan SOP dan SP secara lebih optimal dengan memanfaatkan pihak ke tiga dalam pengiriman KTP, KIA dan aparat wilayah.</p>
<p><i>TREATH</i> (TANTANGAN)</p>	<p><u>SW</u> : Use S to take Avoid/Block T</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengan sarana yang ada perkuat kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memanfaatkan peraturan peraturan yang terbaru.</li> <li>2. Advokasi ke pemegang kebijakan terkait pemenuhan anggaran untuk mendukung pelayanan adminduk sesuai aturan dan memperkuat jaringan internet untuk pelayanan yang lebih baik.</li> <li>3. Meningkatkan kompetensi SDM Disdukcapil sesuai standar sejalan dengan komitmen pegawai yang sudah terbangun dalam memberikan pelayanan secara Offline dan Online.</li> <li>4. Meningkatkan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat akan kepastian pelayanan Adminduk yang sesuai dengan standar pelayanan.</li> </ol>	<p><u>WT</u> : Minimize W to Avoid/Block T</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana yang ada sesuai peraturan yang berlaku.</li> <li>2. Optimalisasi penggunaan anggaran yang ada seefektif dan seefisiensi mungkin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat .</li> <li>3. Optimalkan kemampuan SDM Disdukcapil dalam memberikan pelayanan Adminduk secara Offline.</li> <li>4. Optimalisasi implementasi SOP dan SP untuk mendukung kemudahan masyarakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan pentingnya dokumen kependudukan</li> </ol>
<p>STRATEGIC ACTION/POLICY</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan layanan Go Digital untuk</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komunikasi dan edukasi yang intensif kepada masyarakat dalam meningkatkan</li> </ol>

	pelayanan yang lebih baik kepada Masyarakat	kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan
	2. Peningkatan Kompetensi SDM Disdukcapil dalam mendukung pelayanan Adminduk secara offline dan online	2. Memperkuat kolaborasi dengan instansi pelayanan public lain dalam memberikan kepastian pentingnya dokumen kependudukan.

#### 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan angka kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah, tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi Tahun 2024 semua telah dirancang memenuhi indikator sasaran yang terdapat pada rancangan RKPD.

Tabel T-C.31  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025  
Kota Sukabumi

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	RANCANGAN AWAL RKPD 2024					HASIL ANALISA KEBUTUHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025					Catatan Penting
	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					<b>6.601.827.612</b>					<b>6.601.827.612</b>	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN FEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	disdukcapi	Meningkatnya pemenuhan standar kebutuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana, laporan capaian kinerja dan penganggaran (%)	100%	6.011.903.062	PROGRAM PENUNJANG URUSAN FEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	disdukcapi	Meningkatnya pemenuhan standar kebutuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana, laporan capaian kinerja dan penganggaran (%)	100%	6.011.903.062	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	disdukcapi	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif dan efisien (%)	100	36.310.850	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	disdukcapi	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif dan efisien (%)	100%	36.310.850	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	disdukcapi	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	100	16.489.950,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	disdukcapi	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	100	16.489.950	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	disdukcapi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	100	821.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	disdukcapi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	100	821.500	

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	disdukcapi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	100	499.950	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	disdukcapi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	100	499.950	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	disdukcapi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	100	499.950	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	disdukcapi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	100	499.950	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	disdukcapi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	100	7.999.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	disdukcapi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	100	7.999.700	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	disdukcapi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	100	9.999.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	disdukcapi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	100	9.999.800	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	disdukcapi	Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	3.571.178.412	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	disdukcapi	Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	3.571.178.412	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	disdukcapi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100	3.569.233.562,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	disdukcapi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100	3.569.233.562	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	disdukcapi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	100	678.750,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	disdukcapi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	100	678.750
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD	disdukcapi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD	100	699.750,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD	disdukcapi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	100	699.750
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	disdukcapi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	100	566.350,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	disdukcapi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	100	566.350
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	disdukcapi	Persentase Barang Milik Daerah yang dilaporkan (%)	100	999.600	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	disdukcapi	Persentase Barang Milik Daerah yang dilaporkan (%)	100	999.600
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	disdukcapi	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	100	499.800,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	disdukcapi	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	100	499.800
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	disdukcapi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	499.800,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	disdukcapi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	100	499.800
Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	disdukcapi	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawain Sesuai Standar	100	166.999.900	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	disdukcapi	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawain Sesuai Standar	100	166.999.900
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	disdukcapi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	38.500.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	disdukcapi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	38.500.000

	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	disdukcapi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	124.999.900,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	disdukcapi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	100	124.999.900	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	disdukcapi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	3.500.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	disdukcapi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	disdukcapi	Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	828.572.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	disdukcapi	Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	828.572.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	disdukcapi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	100	9.999.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	disdukcapi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	100	9.999.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	disdukcapi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	100	411.708.500,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	disdukcapi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	100	411.708.500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	disdukcapi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	100	60.722.500,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	disdukcapi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	100	60.722.500	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	disdukcapi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	100	144.655.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	disdukcapi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	100	144.655.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	disdukcapi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	1.480.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	disdukcapi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	100	1.480.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	disdukcapi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100	200.007.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	disdukcapi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100	200.007.000	

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	disudkcapil	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	100	45.450.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	disudkcapil	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	100	45.450.000
Pengadaan Mebel	disudkcapil	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	100	19.950.000,00	Pengadaan Mebel	disudkcapil	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	100	19.950.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	disudkcapil	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	100	25.500.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	disudkcapil	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	100	25.500.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	disudkcapil	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Sesuai Kebutuhan (%)	100	1.040.006.300	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	disudkcapil	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Sesuai Kebutuhan (%)	100	1.040.006.300
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	disudkcapil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	100	1.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	disudkcapil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	100	1.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	disudkcapil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	100	285.173.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	disudkcapil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	100	285.173.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	disudkcapil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	100	753.833.300,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	disudkcapil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	100	753.833.300
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	disudkcapil	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	100	322.386.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	disudkcapil	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	100	322.386.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	100	199.992.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	disudkcapil	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	100	31.788.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	disdukcapi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	100		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	disdukcapi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab	100	90.606.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	disdukcapi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab	100	90.606.000	
	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>disdukcapi</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan (%)</b>	<b>100</b>	<b>309.999.950</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>disdukcapi</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan (%)</b>	<b>100</b>	<b>309.999.950</b>	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	disdukcapi	cakupan kepemilikan KK, Cakupan perekaman KTP-el, Cakupan kepemilikan ktp-el, cakupan kepemilikan kia, jumlah laporan penduduk non permanen (%)	100	306.499.700	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	disdukcapi	cakupan kepemilikan KK, Cakupan perekaman KTP-el, Cakupan kepemilikan ktp-el, cakupan kepemilikan kia, jumlah laporan penduduk non permanen (%)	100	306.499.700	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	disdukcapi	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	100	11.499.700,00	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	disdukcapi	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	100	11.499.700	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	disdukcapi	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	100	295.000.000,00	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	disdukcapi	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	100	295.000.000	
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			100	3.500.250,00						
	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	disdukcapi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	100	3.500.250,00	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	disdukcapi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk		3.500.250	

PROGRAM PENCATATAN SIPIL	disdukcapi	Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan (%)	100	109.999.100	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	disdukcapi	Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan (%)	100	109.999.100
Pelayanan Pencatatan Sipil	disdukcapi	cakupan kepemilikan akte kelahiran, cakupan kepemilikan akte kematian, cakupan kepemilikan akte perkawinan, cakupan kepemilikan akte perceraihan (%)	100	89.999.600	Pelayanan Pencatatan Sipil	disdukcapi	cakupan kepemilikan akte kelahiran, cakupan kepemilikan akte kematian, cakupan kepemilikan akte perkawinan, cakupan kepemilikan akte perceraihan (%)	100	89.999.600
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	disdukcapi	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	100	49.999.800,00	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	disdukcapi	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	100	49.999.800
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	disdukcapi	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	100	39.999.800,00	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	disdukcapi	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	100	39.999.800
Peryelenggaraan Pencatatan Sipil	disdukcapi			19.999.500,00					19.999.500,00
Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	disdukcapi	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil		19.999.500,00	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	disdukcapi	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil		19.999.500
<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>disdukcapi</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan (%)</b>	<b>100</b>	<b>149.942.500</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>disdukcapi</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan (%)</b>	<b>100</b>	<b>149.942.500</b>
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	disdukcapi	Cakupan data kependudukan dan pemanfaatan data (%)	100	49.975.500	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	disdukcapi	Cakupan data kependudukan dan pemanfaatan data (%)	100	49.975.500
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	disdukcapi	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	100	24.990.000,00	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	disdukcapi	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	100	24.990.000
Kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan	disdukcapi	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	100	24.985.500,00	Kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan	disdukcapi	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	100	24.985.500

Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	disdukcapil	cakupan pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna (%)	100	99.967.000	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	disdukcapil	cakupan pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna (%)	100	99.967.000
Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	disdukcapil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	100	99.967.000,00	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	disdukcapil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	100	99.967.000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>disdukcapil</b>	<b>Cakupan Profil Perkembangan Penduduk (%)</b>	<b>100</b>	<b>19.983.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>disdukcapil</b>	<b>Cakupan Profil Perkembangan Penduduk (%)</b>	<b>100</b>	<b>19.983.000</b>
Penyusunan Profil Kependudukan	disdukcapil	Persentase ketersediaan data kependudukan (%)	100	19.983.000	Penyusunan Profil Kependudukan	disdukcapil	Persentase ketersediaan data kependudukan (%)	100	19.983.000
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	100	19.983.000,00	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	disdukcapil	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	100	19.983.000,00

Analisa terhadap Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 terlihat dalam Tabel TC.31 diatas adalah bahwa untuk anggaran 2025 di sesuaikan dengan anggaran tahun 2024 karena adanya penyesuaian pagu Program.

## 2.5 Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan selama ini umumnya berupa program dan kegiatan secara top down dan kurang memperhatikan kebutuhan yang ada di wilayah/lapangan. Oleh karena itu beberapa tahun terakhir ini telah dilaksanakan Musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, forum perangkat daerah, tingkat kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional.

Forum Perangkat Daerah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi dilaksanakan pada tanggal 19 Pebruari 2024 dengan berkoordinasi dengan Bappeda Kota Sukabumi, Forum Perangkat Daerah ini dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat daerah, dalam hal ini kami mengundang Pemangku kepentingan yang terkait sebagai berikut:

1. Ketua DPRD Kota Sukabumi;
2. Kementerian Agama Kota Sukabumi;
3. Pengadilan Agama Kota Sukabumi
4. Pengadilan Negeri Kota Sukabumi;
5. Dinas Sosial Kota Sukabumi;
6. Dinas Kesehatan Kota Sukabumi;
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat;
9. Dinas Komunikasi dan Informatika;
10. Camat Cikole;
11. Camat Gunung Puyuh;
12. Camat Citamiang;
13. Camat Warudoyong;
14. Camat Baros;
15. Camat Cibeureum;

16. Camat Lembur Situ;
17. Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah V Provinsi Jawa Barat;
18. Universitas Muhammadiyah Sukabumi;
19. Lapas Kelas IIB Sukabumi;
20. Bank Jabar Banten (BJB) Kota Sukabumi;
21. LPM Kota Sukabumi;
22. LSM Kota Sukabumi;
23. HIMPAUDI Kota Sukabumi;
24. SMKN 2 Kota Sukabumi;
25. FAKSI Kota Sukabumi;
26. MOCHI BAKAT JAYA Kota Sukabumi;
27. Sukabumi Ekspres;
28. Kabar Indah;
29. Sukabumi.Id;
30. Perwakilan Gereja Kota Sukabumi;

Hal ini dilaksanakan agar aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ini dapat terlibat secara langsung dan apa yang menjadi kebutuhan pembangunan, baik fisik maupun non fisik di wilayah bersifat bottom up dapat diakomodir oleh dinas/instansi yang berkompeten. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi mengadakan Forum Perangkat Daerah agar usulan dari masyarakat hasil musrenbang tingkat kecamatan dapat dibahas dan diterima sebagai program dan kegiatan ditahun berikutnya, sesuai dengan prioritas program dan kegiatan yang ada.

Usulan dari masyarakat hasil musrenbang tingkat kecamatan Tahun 2024 untuk Renja Tahun 2025:

1. Pelatihan Administrasi Kependudukan;
2. Sosialisasi Administrasi Kependudukan
3. Mobile Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan.

Aspirasi dan partisipasi masyarakat ini sebagian besar telah kami tuangkan dalam Program dan Kegiatan Tahun 2025.

REKAP USULAN DARI MASYARAKAT HASIL MUSRENBANG DAN FORUM PERANGKAT DAERAH						
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUKABUMI						
NO	NAMA USULAN	YANG MENGUSULKAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	BESARNYA ANGGARAN Rp.
1	Sosialisasi Administrasi Kependudukan	Kelurahan Nyomplong	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	295.000.000
2	Sosialisasi Administrasi Kependudukan	Kelurahan Cibeureum Hilir	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
3	Sosialisasi Administrasi Kependudukan	Kelurahan Suibang J	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	

BAB III  
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia merupakan Negara urutan keempat di dunia dengan besaran jumlah penduduk setelah China, India dan Amerika Serikat. Pada Tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia sebesar 238,5 juta orang, sedangkan pada Tahun 2015 dan 2020 sebanyak 255,5 juta orang dan 271,1 juta orang, menurut data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. Dengan kondisi jumlah penduduk yang sedemikian besar ini, maka penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib Dokumen Kependudukan sebagaimana Program Nasional periode yang lalu merupakan suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan. Hal tersebut harus dilakukan agar pembangunan yang pada dasarnya obyek dan subyeknya adalah penduduk, dapat dikelola dengan perencanaan yang baik. Prioritas Pembangunan dalam menangani Urusan Kependudukan yang disebutkan dalam Agenda Nasional RPJM Tahun 2015-2019 adalah “Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan”. Dari Prioritas tersebut, Sasaran yang ingin dicapai adalah “meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan”. Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditempuh adalah peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu untuk Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan, antara lain melalui :

- a. Peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi vital terpadu;
- b. Peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti kewarganegaraan bagi seluruh penduduk;
- c. Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan bagi pemangku kebijakan untuk perencanaan pembangunan; dan

- d. Peningkatan kapasitas SDM data dan informasi kependudukan Agenda Pembangunan Nasional merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi sampai Pemerintah Kabupaten/Kota. Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditentukan juga harus menjadi Agenda Pembangunan Pemerintah Kabupaten dengan mengintegrasikan ke dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

### 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi disusun dengan mengacu kepada Tujuan 4 pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 yaitu Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik dan inovatif.

Pernyataan tujuan 4 ini memiliki sasaran, yaitu terwujudnya reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public, dengan outcome Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan, memiliki indikator Persentase kepemilikan administrasi data kependudukan dengan Program Pengelolaan informasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan .

Dengan demikian maka di dalam Renstra 2024-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai 2 tujuan yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan;
2. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.

Untuk tujuan yang kesatu yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan memiliki indikator tujuan/sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, tujuan ke satu memiliki sasaran yaitu Meningkatnya kepemilikan dokumen administasi kependudukan dengan indikator tujuan/sasaran yaitu Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dengan rincian sebagai berikut:

memiliki indikator Tujuan/sasaran sebagai berikut:

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan memiliki Indikator tujuan/sasarannya adalah :

#### 1. Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Program Pengelolaan Profil Kependudukan, memiliki Indikator tujuan/sasarannya adalah: Cakupan Profil Perkembangan Kependudukan.

Program Pendaftaran Penduduk, memiliki Indikator tujuan/sasarannya adalah:

##### 1. Cakupan Dokumen Administrasi Kependudukan, yang meliputi :

- 1.1 Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga;
- 1.2 Cakupan Perekaman KTP-el;
- 1.3 Cakupan Kepemilikan KTP-el;
- 1.4 Cakupan Kepemilikan KIA;
- 1.5 Cakupan Laporan Penduduk Non Permanen;

Program Pencatatan Sipil, memiliki Indikator tujuan/sasarannya adalah:

##### 1. Cakupan Dokumen Pencatatan Sipil, yang meliputi :

- 1.1 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 Tahun;
- 1.2 Cakupan Kepemilikan Akta Kematian;
- 1.3 Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan;
- 1.4 Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian.

Untuk tujuan yang kedua yaitu Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel memiliki 1 (satu) sasaran yaitu:

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator tujuan/sasaran adalah Predikat SAKIP yaitu dengan Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, memiliki Indikator tujuan/sasarannya adalah Persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan tepat waktu, dengan outcome Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang tepat waktu.

### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

#### A. Program

Dalam rangka mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, program telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Program yang telah dilakukan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pendaftaran Penduduk;
3. Program Pencatatan Sipil;
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri melakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan, pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur yang dilakukan dalam bentuk verifikasi dan validasi telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat ini, maka di ganti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kemudian diganti lagi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhitan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

#### 6.1 Kegiatan

Kegiatan instansi pemerintah merupakan penjabaran program kerja yang telah dibuat oleh organisasi atau dengan kata lain program kerja merupakan kumpulan dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan yang dilakukan secara tahunan menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program kerja instansi yang berdimensi 3 (tiga) tahun.

Kegiatan yang telah ditetapkan atau yang dilaksanakan dari Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah;
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- i. Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- j. Pelayanan Pencatatan Sipil;
- k. Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan;
- l. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- m. Penyusunan Profil Kependudukan.

TC. 33

Rumusan Rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025  
dan Prakiraan Maju Tahun 2026  
Kota Sukabumi  
Nama Perangkat Daerah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Uraian/Subbag Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>				<b>6.601.827.612</b>				<b>7.530.385.073</b>	
	<b>PROGRAM PERUKANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Meningkatnya pemenuhan standar ketertarikan administratif, perkantoran, sarana dan prasarana, laporan capaian kinerja dan penganggaran PA</b>		<b>100%</b>	<b>6.011.903.062</b>			<b>100%</b>	<b>6.881.468.068</b>	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan capaian kinerja dan kesungguhan yang efektif dan efisien PA		100%	36.310.836			100%	39.941.935	
	Subbagian Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Smi	2 dokumen	18.489.350,00	APBD		8 dokumen	18.138.945	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Smi	2 dokumen	821.300	APBD		2 dokumen	903.650	
	Koordinasi dan Penyusunan DFA-SKPD	Jumlah Dokumen DFA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DFA-SKPD (Dokumen)	Smi	2 dokumen	499.950	APBD		2 dokumen	549.945	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DFA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DFA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DFA-SKPD (Dokumen)	Smi	2 dokumen	499.950	APBD		2 dokumen	549.945	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tahisis Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Tahisis Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tahisis Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Smi	4 Laporan	7.099.700	APBD		4 dokumen	8.799.670	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Smi	4 Laporan	9.999.800	APBD		1 dokumen	10.999.780	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah PA		100%	3.571.178.412			100%	3.928.296.253	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Smi	22 orang /bulan	3.369.233.562,00	APBD		20 orang /bulan	3.026.156.918	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Smi	2 laporan	678.750,00	APBD		2 laporan	746.623	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	Smi	4 laporan	699.750,00	APBD		4 laporan	768.725	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Smi	2 Dokumen	566.850,00	APBD		2 Dokumen	622.985	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelaporan PA		100%	999.600			100%	1.099.560	
	Penyusunan Perencanaan Ketertarikan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Ketertarikan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Smi	1 Dokumen	499.800,00	APBD		1 Dokumen	549.780	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Smi	1 laporan	499.800,00	APBD		1 laporan	549.780	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Entitas/kegiatan Administrasi Kepegawaian Sesiwa/ Uskodar PA		100%	166.999.900			100%	183.699.890	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Smi	55 paket	38.500.000,00	APBD		55 paket	42.350.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Smi	55 orang	124.999.900,00			55 orang	137.499.890	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Smi	3 paket	1.500.000,00	APBD		3 paket	3.850.000	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	Smi	100%	838.572.000	APBD		100%	1.179.803.900
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Smi	35 paket	9.999.000,00	APBD		35 paket	10.998.900
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Smi	50 paket	411.708.500,00	APBD		50 paket	452.879.350
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Smi	1 Paket	60.722.500,00	APBD		1 Paket	66.794.750
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Smi	6 dokumen	144.653.000,00	APBD		6 dokumen	159.120.500
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	Smi	4 Dokumen	1.480.000	APBD		4 Dokumen	270.002.700
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smi	laporan	200.007.000,00	APBD		laporan	220.007.700
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	Smi	100%	45.450.000	APBD		100%	49.995.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Smi	paket	19.950.000,00	APBD		paket	1.173.156.930
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Smi	1 laporan	25.500.000,00	APBD		1 laporan	28.050.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Sesuai Kebutuhan (%)	Smi	100%	1.040.006.300	APBD		100%	1.144.006.930
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Smi	4 laporan	1.000.000,00	APBD		4 laporan	1.100.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Smi	laporan	285.173.000,00	APBD		laporan	313.690.300
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Smi	31 laporan	753.833.300,00	APBD		31 laporan	829.216.630
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sesuai Kebutuhan (%)	Smi	100%	302.386.600	APBD		100%	354.624.600
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dihayati Pakainya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara (Unit)	Smi	18 unit	199.952.000,00	APBD		18 unit	219.991.200
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Smi	41 unit	31.788.000,00	APBD		41 unit	34.966.800
	Pemeliharaan (Rehabilitasi) Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Smi	1 unit	90.606.000,00	APBD		1 unit	99.666.600

	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan (%)</b>		100%	309.999.950			100%	340.999.943
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	cakupan kepemilikan KK, Cakupan perekaman KTP-el, Cakupan kepemilikan KTP-el, cakupan kepemilikan Rik, jumlah laporan pendudukan non permanen (%)			306.499.700				337.149.670
	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Restrukturisasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Restrukturisasi Kependudukan (Dokumen)	Smi	1 dokumen	11.499.700,00			1 dokumen	12.649.670
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	Smi	1 laporan	295.000.000,00	APRO		1 laporan	324.500.000
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Smi		3.000.230,00	APRO			124.849.285
	Facilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi pendaftaran penduduk	Smi	1 laporan	3.000.230,00	APRO		1 laporan	3.850.275
	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan (%)</b>			<b>109.999.100</b>				<b>120.999.010</b>
	Pelayanan Pencatatan Sipil	cakupan kepemilikan akte kelahiran, cakupan kepemilikan akte kematian, cakupan kepemilikan akte pernikahan, cakupan kepemilikan akte penceraian (%)		3000 layanan	89.999.600				98.999.560
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerimaan Dokumen Atas Pelayanan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerimaan Dokumen Atas Pelayanan Peristiwa Penting (Dokumen)	Smi	1dokumen	48.999.800,00	APRO		1dokumen	54.999.780
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	Smi	layanan	38.999.800,00	APRO		layanan	43.999.780
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Smi		38.999.500,00	APRO			21.999.450
	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Smi	1 laporan	38.999.500,00	APRO		1 laporan	21.999.450
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan (%)</b>	Smi		<b>149.942.500</b>	APRO			<b>164.936.750</b>
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemeliharaan dan Penyajian Database Kependudukan	Cakupan data kependudukan dan pemeliharaan data (%)			49.975.500				54.973.050
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Diajikan (Dokumen)	Smi	1 dokumen	34.990.000,00	APRO		1 dokumen	27.469.000
	Kerja sama Pemeliharaan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemeliharaan Data Kependudukan	Smi	1 Dokumen	34.985.500,00	APRO		1 Dokumen	27.484.050
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	cakupan pemeliharaan data kependudukan oleh lembaga pengguna (%)			99.967.000				109.963.700
	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	Smi	1 Laporan	99.967.000,00			1 Laporan	109.963.700
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Cakupan Profil Perkembangan Penduduk (%)</b>			<b>19.983.000</b>				<b>21.981.300</b>
	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan data kependudukan (%)			19.983.000				21.981.300
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)		1 dokumen	38.983.000,00			1 dokumen	21.981.300

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Tahun 2025 mencerminkan Rencana Kegiatan, Program dan Sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi.

Pada dasarnya Rencana Kerja Tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai, target kinerja yang harus dicapai selama tahun 2024 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi dalam pencapaian tujuan dan sasarnya. Program yang akan dilakukan dimasa mendatang merupakan kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang akan dilaksanakan. Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi ada 4 (empat) yang langsung mengarah kepada indikator kinerja yaitu:

1. Program Pendaftaran Penduduk;
2. Program Pencatatan Sipil;
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

Sedangkan program lain yang menunjang pada pencapaian indikator kinerja yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, anggaran tahun 2025 ini ada 3 (tiga) Program yang menjadi Prioritas Nasional terkait kemiskinan ekstrem yang di alokasi kan dalam tahun anggaran ini sebagai berikut:

1. Program Pendaftaran Penduduk  
Kegiatan : Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk  
Subkegiatan : Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
2. Program Pencatatan Sipil;  
Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil  
Subkegiatan : Peningkatan dalam pelayanan Pencatatan Sipil
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.  
Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, yaitu:

- a. Subkegiatan : Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
- b. Subkegiatan : Kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan;

Kaidah kaidah Pelaksanaan yang akan dilakukan oleh setiap sub kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Subkegiatan Fasilitasi Pendaftaran penduduk kegiatannya adalah rapat koordinasi & pengumpulan data anak yang termasuk dalam 5 kelompok sasaran (penderita HIV, penganut kepercayaan, berhadapan dengan hukum, disabilitas, masyarakat adat);
- b. Subkegiatan Peningkatan dalam pelayanan Pencatatan Sipil kegiatannya adalah akan melakukan kegiatan isbath nikah;
- c. Subkegiatan : Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, kegiatannya adalah akan Menyusun buku agregat kependudukan Kota Sukabumi;
- d. Subkegiatan Kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan, kegiatannya adalah akan melakukan kegiatan pemanfaatan data kependudukan oleh Lembaga pengguna.

yang telah ditetapkan atau yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- 1356 -

Tabel TC 34

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUKABUMI  
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						6.670.085.445,00								9.734.447.450,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.670.085.445,00							9.734.447.450,00		
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						6.670.085.445,00							9.734.447.450,00		
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	6.071.995.995,00						-	8.464.588.000,00		
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 %			-	54.270.600,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	100 %	50.050.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	36.489.800,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	2 Dokumen	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	821.500,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	2 Dokumen	1.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	2 Dokumen	550.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	499.950,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	2 Dokumen	550.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	499.950,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	2 Dokumen	550.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.12.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					4 Laporan	6.999.700,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	4 Laporan	8.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Laporan	8.999.700,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	1 Laporan	11.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0011		Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD					2 Dokumen	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-		27.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 %			-	3.655.442.795,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	100 %	3.962.310.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Progress Realisasi Anggaran	2 Dokumen			2 Dokumen	566.350,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	2 Dokumen	770.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 %			-	999.600,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	100 %	3.300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0001	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	499.800,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	1 Dokumen	1.650.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan			2 Laporan	499.800,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	2 Laporan	1.650.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 %			-	155.249.900,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	100 %	363.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	55 Paket			55 Paket	30.250.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	55 Paket	60.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang			55 Orang	124.999.900,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	55 Orang	181.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang			55 Orang	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	55 Orang	121.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENKA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %			-	806.862.800,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	100 %	1.442.628.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	9.999.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	3 Paket	11.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	389.999.300,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	3 Paket	825.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REKJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket			3 Paket	60.722.500,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	35 Paket	88.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	10 Paket			2 Paket	144.655.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	10 Paket	187.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen			4 Dokumen	1.480.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	4 Dokumen	1.628.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan			156 Laporan	200.007.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	10 Laporan	330.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket			3 Paket	60.722.500,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	35 Paket	88.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket			2 Paket	144.655.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	10 Paket	187.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen			4 Dokumen	1.480.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	4 Dokumen	1.628.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan			156 Laporan	200.007.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	10 Laporan	330.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket			3 Paket	60.722.500,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	35 Paket	88.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket			2 Paket	144.655.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	10 Paket	187.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen			4 Dokumen	1.480.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	4 Dokumen	1.628.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan			156 Laporan	200.007.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	10 Laporan	330.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit			22 Unit	199.992.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	1 Unit	385.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit			25 Unit	24.886.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	25 Unit	110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	17 Unit			1 Unit	90.606.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	17 Unit	275.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-			-	327.698.850,00						-	505.359.450,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	96 %			-	306.499.700,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	96 %	461.359.450,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJIA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PESANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.12.02.2.01.0001		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1000 Dokumen			1000 Dokumen	11.499.700,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	1000 Dokumen	44.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0004		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	6 Laporan			6 Laporan	295.000.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	6 Laporan	417.359.450,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	100 %			-	21.199.150,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	100 %	44.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.03.0003		Fasilitasi Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	1 Laporan			1 Laporan	21.199.150,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	1 Laporan	44.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-			-	101.765.100,00						-	429.000.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	100 %			-	81.765.600,00				Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	100 %	209.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	2 Dokumen			4000 Dokumen	41.765.800,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	2 Dokumen	99.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3000 Layanan			3000 Layanan	39.999.800,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	3000 Layanan	110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	100 %			-	19.999.500,00				Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	100 %	220.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		PRIORITAS	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.12.03.2.02.0003		Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayan Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayan Pencatatan Sipil	1 Laporan			1 Laporan	0,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	1 Laporan	55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.02.0008		Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan			1 Laporan	19.999.500,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	1 Laporan	165.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-			-	148.642.500,00						-	253.000.000,00	
2.12.04.2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemertastan dan Penyajian Database Kependudukan	-	100 %			-	49.975.500,00						-	88.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.01.0001		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Ditah dan Disajikan	1 Dokumen			1 Dokumen	24.990.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	1 Dokumen	55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.01.0002		Keja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen			1 Dokumen	24.985.500,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	1 Dokumen	33.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	100 %			-	98.667.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	100 %	165.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.0005		Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan			1 Laporan	98.667.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	1 Laporan	165.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	-			-	19.983.000,00						-	82.500.000,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	-	100 %			-	19.983.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	100 %	82.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain														
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen			1 Dokumen	19.983.000,00	Kota Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Peningkata n Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	-	1 Dokumen	82.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
<b>J U M L A H</b>								<b>6.670.085.445,00</b>							<b>8.734.447.450,00</b>	

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2025 ini merupakan penjabaran pelaksanaan RKPD Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026. Dengan mengacu pada RKPD Pemerintah Kota Sukabumi Tahun 2025 dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan capaian triwulan 1 Renja Tahun 2024, Renja Tahun 2025 merupakan tahap pengembangan program dan kegiatan prioritas guna mewujudkan visi dan misi jangka menengah Pemerintah Daerah. Dengan demikian, tingkat keberhasilan Renja Tahun 2025, akan menentukan keberhasilan serta berkesinambungan pelaksanaan kinerja Pemerintah Daerah.

Rencana kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Renja 2025 disusun sebagai perencanaan operasional tahunan pembangunan bidang Administrasi Kependudukan.

Dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya yang dimiliki, penyusunan Renja 2025 juga diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan ini sangat bergantung pada komitmen penyelenggara itu sendiri, Untuk itu Rencana Kerja 2025 ini agar menjadi pedoman bagi penyelenggara di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi selama kurun waktu satu tahun mendatang.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja 2025 ini semoga bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di dalam Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Daerah.

Renja Dinas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, langkah-langkah persiapan dimulai sejak penetapan hingga pelaksanaannya secara terus menerus dan berkesinambungan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasai, efektif dan efisien dalam penyelenggaraan tugas pelayanan administrasi kependudukan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi Tahun 2025 yang kami susun sebagai salah satu pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas yaitu melaksanakan Pelayanan Administrasi Kependudukan.